ASPEK YURIDIS

**Makalah Ini Disusun untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis**

Kelompok 9:

Indi	(90500120119)
Ardina Rasti	(9050012011)
Nurul Awal	(9050012011)

**PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul “ASPEK YURIDIS” ini dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin kami tidak akan mampu menyelesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Umar SUPRIADI,S.E.I, M.E.I., selaku Dosen Studi Kelayakan Bisnis program studi Perbankan Syariah. Yang telah memberikan arahan dalam menyusun makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Kami menyadari bahwa makalah ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Terima Kasih.

Wassalamu'alakum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bantaeng, 23 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ASPEK YURIDIS	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	iv
A. Latar Belakang.....	iv
B. Rumusan Masalah	iv
C. Tujuan	v
BAB II PEMBAHASAN	vi
A. Pengertian Aspek Yuridis atau Hukum	vi
B. Analisa Calon Debitur Dalam Aspek Yuridis	vii
BAB III PENUTUP	xiii
A. Kesimpulan.....	xiii
B. Saran	xiii
DAFTAR PUSTAKA	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memulai studi kelayakan bisnis suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek yuridis/aspek hukum, walaupun banyak pula yang melakukannya dari aspek lain tergantung dari kesiapan data dan kesiapan dari para penilai. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki.

Penilaian aspek ini penting dilakukan sebelum proyek diberhentikan oleh pihak yang berwajib karena dianggap beroperasi secara ilegal atau menghadapi protes masyarakat yang menganggap bahwa proyek/bisnis yang dibangun melanggar kemasyarakatan. Dalam aspek yuridis, kita perlu melihat dari sisi : siapa pelaksana proyek, proyek apa yang dibuat, dimana proyek akan dibuat, kapan proyek akan dilaksanakan, dan bagaimana proyek dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu aspek yuridis?
2. Siapa pelaku bisnis?
3. Bisnis apa yang akan dilaksanakan?
4. Dimana bisnis akan dilaksanakan
5. Kapan bisnis dilaksanakan?
6. Bagaimana peraturan dan perundang dalam bisnis

C. Tujuan

1. Menganalisis pengertian aspek yuridis/hukum
2. Menganalisis siapa saja pelaku bisnis
3. Menganalisis bisnis apa yang akan dilaksanakan
4. Menganalisis dimana bisnis akan dilaksanakan
5. Menganalisis kapan bisnis dilaksanakan
6. Menganalisis peraturan dan perundangan dalam bisnis

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Aspek Yuridis atau Hukum

Yuridis adalah hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis (undang-undang) maupun lisan (hukum adat). Tujuan dari aspek ini yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen yang dimiliki. Penelitian ini sangat penting dilaksanakan sebelum usaha dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus lebih dahulu terpenuhi. Bagi badan usaha yang akan dijalankan juga perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum seperti badan hukum perusahaan yang dipilih seperti PT, firma, koperasi atau yayasan.

Penilaian dan analisis aspek yuridis sangat perlu dilakukan bagi calon kreditor yang akan memberikan bantuan pinjaman, juga bagi calon investor yang ingin menanamkan modal di bisnis yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin calon kreditor yang bersangkutan aman karena tidak terlibat dalam suatu kegiatan yang menyimpang hukum. Bagi pemilik bisnis, analisis yuridis adalah untuk meyakinkan kepada calon kreditor atau investor bahwa bisnis tersebut tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku.

B. Analisa Calon Debitur Dalam Aspek Yuridis

1. Siapa Pelaksana Bisnis

Dalam menganalisis calon debitur kita harus mengetahui siapa pelaksana bisnis, pembahasannya terbagi 2, yang pertama adalah bentuk badan usaha dan yang kedua adalah identitas pelaksana bisnis.

a. Bentuk badan usaha

- Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Tujuan utama didirikannya perusahaan ini adalah semata mata untuk mencari keuntungan. Akan tetapi dilain sisi, pihak juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.
- Firma adalah bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik itu individu maupun bersama-sama terhadap utang perusahaan pada pihak-pihak lain.
- Perseroan komanditer (CV) merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Sekutu dalam perseroan komanditer ini ada dua macam, ada yang disebut sekutu komplementer (orang yang bersedia mengatur perusahaan) dan sekutu komanditer (orang yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan).

- Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha, karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan, antara lain bidang usahanya lebih luas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.
- Perusahaan Negara (PN) adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang modalnya keseluruhan milik negara. Tujuannya untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan dengan peraturan daerah. Sebagian besar atau keseluruhan modalnya adalah milik pemerintah daerah yang dipisahkan, kecuali dengan ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
- Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan mencari keuntungan akan tetapi lebih menekankan kepada tujuan sosial. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah dan lainnya. Yayasan ini memiliki pengurus yang hartanya dipisah dengan harta yayasan
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasaeakan asas keuangan.

b. Identitas pelaksana bisnis

Beberapa sisi dari identitas pelaksana bisnis perlu diteliti adalah sebagai berikut:

- Kewarganegaraan sponsor proyek harus diketahui, hal ini berhubungan dengan peraturan yang berbeda antara warga negara dengan warga negara asing dalam kaitannya dengan pendirian suatu perusahaan
- Informasi ban adalah keterlibatan debitur pada bank lain. Perlu diketahui apakah ada keterlibatan lain misalnya terdapat kemacetan pembayaran kredit, cek kosong, maupun jaminannya.
- Keterlibatan pidana atau perdata juga perlu diketahui apakah pelaksana proyek tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan ataupun tuntutan.
- Hubungan keluarga. Misalnya suami-istri orang tua-anak sebagai individu yang terlibat dalam rencana proyek bisnis, perlu diselidiki bagaimana mereka mengatur kebijakan hartanya.

2. Bisnis Apa Yang Akan Dilaksanakan

Sebelum dilaksanakan, bisnis juga perlu dikaji agar kita mengetahui apakah bisnis tersebut dilarang atau tidak. Adapun beberapa sisi yang perlu dianalisis adalah :

- Bidang usaha. Paling tidak bidang usaha dari proyek yang akan dibangun harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
- Fasilitas. Apabila proyek akan mendapat fasilitas-fasilitas tertentu, maka perlu diselidiki apakah kepengurusannya telah selesai secara sah.
- Gangguan lingkungan. Proyek yang akan dibuat perlu memperhatikan lingkungan sekitar tempat proyek berada. Perencanaan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek akan berdampak negatif pada proyek itu sendiri, seperti pencemaran udara, air, suara dan moral masyarakat.
- Pengupahan. Proyek yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill rendah biasanya tidak kesulitan memperolehnya dan mereka pun mau dibayar dengan rendah. Sistem upah perlu memperhatikan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat karena jika dilanggar, keresahan buruh akan berdampak negatif pada proyek.

3. Dimana Bisnis Akan Dilaksanakan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi proyek adalah sebagai berikut:

- Perencanaan wilayah. Lokasi proyek harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mudah

mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Disamping itu juga diperhatikan prakiraan situasi dan kondisi lokasi proyek dalam waktu yang akan datang. Peneliti dapat mencari informasi tentang perencanaan wilayah ini, misalnya dengan menghubungi kantor pemda setempat yang mengurus perencanaan wilayah dimana proyek bisnis akan berada.

- Status tanah. Kepemilikan tanah proyek harus jelas. Peneliti dapat mencari informasi tentang status tanah ini, misalnya dengan menghubungi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat.

4. Waktu Pelaksanaan Bisnis

Dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan bisnis, tinjauan aspek yuridis terhadap izin pelaksanaan proyek bisnis menjadi penting diteliti. Semua izin harus masih berlaku dan izin-izin yang belum dimiliki haruslah dilengkapi terlebih dahulu. Perizinan tersebut antara lain:

- Izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan, misalnya Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perhotelan, Izin Usaha EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), Izin Usaha Periklanan, dan sebagainya.
- Izin usaha perdagangan serta Izin Mendirikan Bangunan, Hider Ordonnantie/ Izin gangguan atas ketidaknyamanan atau gangguan/ bahaya ditempat usaha, izin lokasi yang telah disebut diatas

- Izin khusus, misalnya bidang perhotelan, Izin Usaha Industri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP,) dan lain-lain.

5. Peraturan dan perundangan

Peraturan pemerintah berkaitan dengan aspek yuridis yang harus dipatuhi dalam pendirian suatu usaha, antara lain:

- UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- PP No.63 Tahun 2008 tentang Yayasan
- UU No.25 Tahun 1995 tentang Koperasi
- UU No.13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No.13/M-DAG/PER/3/2006
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Penjualan Langsung
- UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- PP No 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Perseroan Dibidang
Pengelolaan Aset

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Yuridis adalah hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tulisan maupun lisan.

Terdapat jenis-jenis izin usaha, yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin-izin Usaha, Sertifikat Tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Izin Usaha Tambang, Izin Usaha Perhotelan dan Pariwisata, Izin Usaha Farmasi dan Rumah sakit, Izin Usaha Peternakan dan pertanian, Izin Domisili, dimana perusahaan/lokasi proye berada, Izin gangguan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tenaga Kerja Asing jika perusahaan menggunakan tenaga asing.

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa calon debitur antara lain : siapa pelaksana bisnis, bisnis apa yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan bisnis, serta peraturan dan perundangan

B. Saran

Demikian makalah ini kami buat. Apabila ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf. Kritik dan saran sangat dibutuhkan agar kami dapat membuat makalah yang baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, K. (2019). Peran Studi Kelayakan Bisnis dalam peningkatan UMKM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(2), 101-115.
- Jumingan. (2009). *Studi Kelayakan Bisnis : teori dan pembuatan proposal kelayakan*. jakarta: PT.Bumi Angkasa.
- kasmir, & Jakfar. (2006). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyanto, Nadi, L., & Wenten, I. k. (2020). *Studi Kelayakan Bisnis*. Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju.
- Sulastri, L. (2016). *Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha*. Bandung: LaGood's Publishing.